

**LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMANDAU**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**(AUDITED)**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KABUPATEN LAMANDAU**  
**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas pertolongan dan karunianya maka proses penyusunan Laporan Keuangan Dinas dan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lamandau Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan Keuangan disusun mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan menyajikan informasi kinerja keuangan (neraca) posisi 31 Desember 2023 meliputi realisasi penerimaan pendapatan, realisasi belanja operasional, belanja barang dan jasa serta perkembangan asset sesuai kondisi riil pada Dinas PMPTSP Kabupaten Lamandau. Laporan ini merupakan gambaran ringkas atas aktivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung pencapaian visi misi kabupaten lamandau tahun 2018-2023.

Kami menyadari bahwa dalam penyampaian Laporan Keuangan ini masih terdapat kekurangan karenanya masukan yang konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan laporan dimasa mendatang, kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Nanga Bulik, Juni 2024

Kepala Dinas,



**MUL'ATMIDY, S.Sos, M.A.P**

Pembina Tingkat I (IV.b)

NIP. 19790402 200502 1 004

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan Pelaksanaan Anggaran, Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini disampaikan, untuk bahan kelengkapan laporan keuangan DPMPTSP selaku entitas pelaporan.

Nanga Bulik,     Juni 2024

Kepala Dinas,

materai

**MUL'ATMIDY, S.Sos, M.A.P**

Pembina Tingkat I (IV.b)

NIP. 19790402 200502 1 004

## BAB I

### PENDAHULUAN

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau selama satu periode pelaporan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan untuk kepentingan :

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode laporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas pokok DPMPTSP Kabupaten Lamandau adalah membantu Bupati Lamandau dalam menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
2. Melakukan koordinasi dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
3. Pembinaan dan pengkoordinasian penerapan standar teknis perizinan terpadu;
4. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal secara terpadu;

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 - 2018, Visi, Misi Kabupaten Lamandau dan Rencana Strategis DPMPTSP ditetapkan tujuan SKPD DPMPTSP 2018-2023 adalah “ ***Meningkatnya Investasi Daerah*** “, dengan sasaran :

1. Meningkatnya realisasi investasi daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan

**1.1. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD DPMPTSP dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Lamandau atas pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan secara terbuka, jujur, transparan dan akuntabel terhadap kinerja keuangan DPMPTSP selama satu periode pelaporan tahun buku 2024. Laporan Keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Komponen-komponen dapat dijelaskan sebagai berikut :

**- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja.

**- Neraca**

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

**- Laporan Operasional (LO)**

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai pendapatan yang diperoleh oleh SKPD selama tahun berjalan, beban operasional yang meliputi beban gaji dan tunjangan, beban barang ATK, beban barang dan jasa, serta beban penyusutan. Jika jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah beban operasional, maka selisihnya disebut Surplus Operasional. Sebaliknya jika Pendapatan Operasional lebih kecil dari pada beban Operasional selisihnya disebut Defisit Operasional.

**- Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan perubahan ekuitas ini menyajikan informasi mengenai Ekuitas pada awal tahun, surplus atau defisit operasional tahun yang bersangkutan, Dampak Perubahan Kebijakan/Kesalahan Akuntansi, dan lain-lain serta ekuitas akhir.

**- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

Catatan atas Laporan Keuangan SKPD menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami secara keliru oleh para pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Oleh karena itu, penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

dimaksudkan agar Laporan Keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca ataupun manajemen entitas akuntansi.

## **1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);

11. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 57 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Penyajian informasi Catatan atas Laporan Keuangan SKPD mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I      Pendahuluan
  - 1.1. Maksud dan Tujuan
  - 1.2. Landasan Hukum
  - 1.3. Sistematika Penulisan
- BAB II     Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD, SKPD
  - 2.1. Ekonomi Makro
  - 2.2. Kebijakan Keuangan
  - 2.3. Indikator Pencapaian target kinerja APBD
- BAB III    Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
  - 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
  - 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang ditetapkan
- BAB IV    Kebijakan Akuntansi
  - 4.1. Entitas Akuntansi SKPD
  - 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
  - 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
  - 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD.
- BAB V     Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD
  - 5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
    - 5.1.1. Pendapatan-LRA
    - 5.1.2. Belanja
  - 5.2. Laporan Operasional (LO)
    - 5.2.1. Pendapatan-LO
    - 5.2.2. Beban

5.3. Laporan Perubahan Ekuitas

5.3.1. Perubahan Ekuitas

5.4. Neraca

5.4.1. Aset

5.4.2. Kewajiban

5.4.3. Ekuitas

BAB VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

BAB VII Penutup



## **BAB II**

### **INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 - 2018, Visi, Misi Kabupaten Lamandau dan Rencana Strategis DPMPTSP ditetapkan tujuan SKPD DPMPTSP 2018-2023 adalah “ *Meningkatnya Investasi Daerah* “, dengan sasaran :

1. Meningkatnya realisasi investasi daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan

Realisasi Capaian Target Kinerja Dinas Penanaman Moal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel Capaian Target Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Moal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

	Tujuan	Sasaran	Indikator Pencapaian Sasaran Program	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2021	Realisasi 2021	Ket.
1	2	3	4	5			6	7	6	7	9
1	Meningkatnya Investasi Daerah		Persentase Peningkatan Investasi Daerah (PMA & PMDN)	Persen	2,40	4,95	2,35	7,09	2,30	5,60	Laporan Realisasi Investasi PMA dan PMDN
		Meningkatnya realisasi Investasi Daerah	1Jumlah Realisasi Investasi	Triliun	10.237.165.292.728,8	13.880.714.681.514	9.997.231.731.180.43	13.226.442.864.811	9.767.690.992.848.49	12.351.046.749.712	
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan	2Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,40	84,397	82,35	82,78	82,30	95,15	Laporan Hasil IKM

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan**

Berdasarkan DPPA DPMPTSP Tahun Anggaran 2023 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 5.254.735.972,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 500.800.000,- sehingga total anggaran belanja sebesar Rp. 5.755.535.972,00 dengan target pendapatan dari Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp. 900.000,00

Realisasi Pendapatan dari Retribusi Daerah pada DPMPTSP adalah senilai Rp. 900.000,- atau 100% dari target, sedangkan realisasi belanja (DAU dan DAK) sebesar Rp. 5.619.111.812,00 atau 97,63%.

Kemudian secara rinci realisasi pencapaian target kinerja pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN 2023	PAGU REALISASI 2023	SISA PAGU ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.198.387.891	3.152.237.567	46.150.324	98,55
2	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	62.563.300	62.375.000	188.300	99,70
	2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.000.000	6.000.000	0.00	100
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.963.200	6.765.000	4.198.200	61,71
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	391.409.923	375.128.800	16.281.123	95,84
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.027.016	15.353.000	674.016	95,79
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.732.000	6.250.000	6.482.000	49,09
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.050.957	29.019.600	4.031.357	87,80
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.400.000	11.184.000	1.216.000	90,19
	7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	409.554.100	406.714.625	2.839.475	99,31
4	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.700.000	3.500.000	2.200.000	61,40
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	148.774.592	142.053.022	6.721.570	95,48
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	279.579.936	267.897.044	11.682.892	95,82
5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.158.909	74.446.226	9.712.683	88,46
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.590.000	17.690.000	7.900.000	69,13

	3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000	39.837.000	163.000	99,59
6	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>					
	1.	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	189.059.991	188.594.430	465.561	99,77
	2.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	143.762.501	141.586.200	2.176.301	98,49
7	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>					
	1.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	40.661.755	40.648.995	12.760	99,97
	2.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	61.769.793	60.645.800	1.123.993	98,18
8	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>					
	1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	42.405.641	40.523.150	1.882.491	95,56
	2.	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	3.841.068	3.675.000	166.085	95,68
9	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>					
	1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	317.981.646	312.791.003	5.190.643	98,37
	2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	192.318.354	189.826.350	2.492.004	98,70
10.	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabuapten/Kota</b>					
	1.	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan PerizinanBerusaha Terintengrasi Secara Elektronik	26.843.381	24.370.000	2.473.381	90,78
			<b>5.755.535.972</b>	<b>5.619.111.812</b>	<b>136.424.160</b>	<b>97,63</b>

**3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan**

Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pencapaian target adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan program dan kegiatan belum sesuai jadwal (*Time Schedule*) dan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal;
- b. Belum maksimalnya perencanaan dalam merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;

## **BAB IV.**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pengelolaan Keuangan SKPD telah diserahkan kepada masing-masing SKPD/SOPD sesuai dengan fungsi yang berperan sebagai **entitas akuntansi** berkewajiban menyampaikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang kepada Bupati Lamandau melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Bendahara Umum Daerah.

#### **4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan DPMPTSP adalah BASIS AKRUAL (*Accrual Basis*) untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran serta untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

Pendapatan meliputi semua penerimaan di Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat terjadinya pembayaran. Jenis pendapatan yang menjadi target didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Tahun 2023 adalah pendapatan yang bersumber dari retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu pemakaian rumah dinas oleh penjaga malam.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut diverifikasi dan disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan nominal uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD DPMPTSP Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :

##### **4.3.1. Pengukuran/ Penilaian Aset**

###### **a. Kas**

Kas dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

###### **b. Piutang**

Piutang dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

###### **c. Persediaan**

Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.

###### **d. Tanah**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

###### **e. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

###### **f. Peralatan dan Mesin**

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai

siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya jasa konsultan perencanaan dan jasa konsultan pengawasan, biaya perizinan.

**g. Aset Tetap Lainnya**

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

**4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Tahun 2023 adalah **BASIS AKRUAL** untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran serta untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran**

**5.1.1 Pendapatan**

	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Pendapatan	900.000,00	900.000,00	900.000,00

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 900.000,00 dan Rp. 900.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022.

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	900.000,00	900.000,00		900.000,00
Jumlah	900.000,00	900.000,00	100	900.000,00

**5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Pendapatan Asli Daerah	900.000,00	900.000,00	900.000,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 900.000,00 dan Rp. 900.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022.

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Retribusi Daerah	900.000,00	900.000,00		900.000,00
Jumlah	900.000,00	900.000,00	100	900.000,00

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan asli Daerah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang diuraikan diantaranya sebagai berikut:
  - Pendapatan asli daerah bersumber dari retibusi daerah pemakaian Rumah Dinas Jaga Malam, pendapatan asli daerah tersebut tidak pernah mengalami kenaikan atau pun penurunan dari tahun-tahun sebelumnya Karena pemakiaan Rumah dinas untuk rumah penjaga Malam tipe 36 Sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) / bulan.
- Pemungutan Retribusi Daerah di atas telah dilandasi Peraturan Bupati sebagai berikut:  
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum.



5.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2023 900.000,00	Realisasi 2023 900.000,00	Realisasi 2022 900.000,00
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 900.000,00 dan Rp 900.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Retribusi Penyewaan Bangunan	900.000,00	900.000,00		900.000,00
Jumlah	900.000,00	900.000,00	100	900.000,00

Penjelasan:

- 3. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan asli Daerah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang diuraikan diantaranya sebagai berikut:
  - b. Pendapatan asli daerah bersumber dari retibusi daerah pemakaian Rumah Dinas Jaga Malam, pendapatan asli daerah tersebut tidak pernah mengalami kenaikan atau pun penurunan dari tahun-tahun sebelumnya Karena pemakiaan Rumah dinas untuk rumah penjaga Malam tipe 36 Sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) / bulan.
- 4. Pemungutan Retribusi Daerah di atas telah dilandasi Peraturan Bupati sebagai berikut: Peraturan Bupati Lamandau Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum.

5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.2 Belanja

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja	5.755.535.972,00	5.619.111.812,00	4.970.478.527,00

Realisasi Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 5.619.111.812,00 dan Rp 4.970.478.527,00, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022.

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Operasi	5.448.586.222,00	5.327.224.262,00	97,77	4.894.468.527,00
Belanja Modal	306.949.750,00	291.887.550,00	95,09	961.428.160,00
Jumlah	5.755.535.972,00	5.619.111.812,00	97,63	4.970.478.527,00

5.1.1.1 Belanja Operasi

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Operasi	5.448.586.222,00	5.327.224.262,00	4.894.468.527,00

Realisasi Belanja Operasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 5.327.224.262,00 dan Rp 4.894.468.527,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Pegawai	3.206.547.891,00	3.160.397.567,000	98,56	3.104.298.958,00
Belanja Barang dan Jasa	2.242.038.331,00	2.166.826.695,000	96,65	1.790.169.569,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.448.586.222,00</b>	<b>5.327.224.262,00</b>	<b>98,77</b>	<b>4.894.468.527,00</b>

5.1.1.1.1 Belanja Pegawai

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Pegawai	3.206.547.891,00	3.160.397.567,00	3.104.298.958,00

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 3.160.397.567,00 dan Rp 3.104.298.958,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Gaji Pokok ASN	1.240.574.548,00	1.229.439.700,00	99,10	1.2121.287.900,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	114.590.809,00	111.575.236,00	97,36	110.284.202,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	168.904.750,00	162.530.000,00	96,23	157.960.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	26.281.000,00	25.640.000	97,56	26.240.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	78.762.784,00	76.692.780,00	97,37	77.272.140,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	45.623.087,00	43.007.222,00	94,26	53.274.013,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	15.000,00	14.351,00	95,67	13.888,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.223.185.913,00	1.207.178.278,00	98,69	1.158.696.815,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	300.450.000,00	296.160.000,00	98,57	302.150.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	100	6.120.000,00
Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.206.547.891,00</b>	<b>3.160.397.567,00</b>	<b>98,56</b>	<b>3.104.298.958,00</b>

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
  - Adanya Pejabat Kepala Dinas Depenitif.
  - Adanya kenaikan golongan/pangkat dan kenaikan Gaji Berkala Pegawai An. Yana Kontesa, M. Ikhwanudin.

5.1.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Barang dan Jasa	2.242.038.331,00	2.166.826.695,00	1.790.169.569,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 2.166.826.695,00, dan Rp 1.790.169.569,00, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022 Per Akun:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi	15.472.077,00	15.275.000,00	98,72	9.460.000,00
Belanja Bahan Kimia	3.178.350,,00	3.140.000,00	98.79	1.240.000,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	42.771.489,00	32.379.926,00	75,70	39.905.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.771.489,00	8.528.000,00	97,22	6.685.000,00

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	36.809.434,00	36.500.000,00	99,15	16.374.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku cadang lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	88.676.800,00	88.281.945,00	99,55	99.774.427,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	150.497.414,00	142.929.450,00	94,97	137.241.900,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	8.400.000,00	5.200.000,00	61,90	4.995.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	10.963.200,00	6.765.000,00	61,70	4.649.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	29.500.000,00	29.500.000,00	100	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	18.000.000,00	18.000.000,00	100	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	41.084.695,00	40.584.695,00	98,78	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	22.401.003,00	20.145.000,00	89,92	29.347.150,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	242.020.600,00	234.090.100,00	96,72	107.486.350,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00	0,00	4.380.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.012.000,00	3.010.000,00	99,93	18.214.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	24.050.000,00
Belanja Pakaian KORPRI	19.563.300,00	19.375.000,00	99,03	0,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	19.300.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	18.000.000,00	18.000.000,00	100	0,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.600.000,00	24.500.000,00	99,59	22.900.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	180.348.000,00	169.591.875,00	94,03	138.083.376,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	181.000.000,00	181.000.000,00	100	207.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	64.972.000,00	62.930.773,00	96,85	48.112.753,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	22.956.000,00	22.956.000,00	100	22.920.000,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	20.724.000,00	20.724.000,00	100	20.688.000,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	0,00	0,00	32.688.000,00
Belanja Tagihan Air	7.802.000,00	7.048.900,00	100	7.774.600,00
Belanja Tagihan Listrik	92.972.592,00	91.757.322,00	98,69	87.083.248,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.400.000,00	11.184.000,00	90,19	10.734.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	48.000.000,00	43.246.800,00	90,09	41.739.600,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.800.000,00	6.706.300,00	98,62	5.902.700,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	18.179.568,00	18.061.424,00	99,35	15.638.428,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.593.768,00	1.490.180,00	93,50	176.520,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	1.136.543,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	14.090.616,00	9.740.000,00	69,12	3.910.000,00

Belanja Bimbingan Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	100	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	12.780.000,00	4.890.000,00	38,26	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.810.000,00	12.800.000,00		12.200.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	620.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	40.000.000,00	39.837.000,00	99,92	19.795.900,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	464.828.000,00	464.327.055,00	99,89	311.969.074,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	250.365.700,00	246.330.950,00	98,38	226.495.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	270.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.242.038.331,00</b>	<b>2.166.826.695,00</b>	<b>96,65</b>	<b>1.790.169.569,00</b>

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
  - a. Hal ini disebabkan karena adanya tambahan pagu anggaran kegiatan tahun 2023, yaitu kegiatan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata dan tambahan anggaran untuk Perjalanan dinas, kegiatan makan/minum bimbingan teknis bagi pelaku usaha di program kegiatan Pngendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.

### 5.1.1.2 Belanja Modal

Belanja Modal	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	306.949.750,00	291.887.550,00	76.010.000,00

Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dengan anggaran dan realisasi dalam tahun 2023 dan tahun 2022 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	306.949.750,00	291.887.550,00	95,09	76.010.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>306.949.750,00</b>	<b>291.887.550,00</b>	<b>95,09</b>	<b>76.010.000,00</b>

5.1.1.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	306.949.750,00	291.887.550,00	76.010.000,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 306.949.750,00 dan Rp. 291.887.550,00

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 & 2022 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	134.600.000,00	121.706.000,00	90,42	0,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	57.500.000,00	57.492.450,00	99,98	0,00
Belanja Modal Mebel	11.000.000,00	9.100.000,00	82,72	0,00
Belanja Modal Alat Pendingin	4.778.000,00	4.773.000,00	99,89	0,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja Pejabat	3.900.000,00	3.896.100,00	99,9	0,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Personal Computer	57.550.000,00	57.350.000,00	99,65	76.010.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	22.821.750,00	22.770.000,00	99,77	0,00
Jumlah	306.949.750,00	291.887.550,00	95,09	76.010.000,00

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Peralatan dan Mesin di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
  - Pada Tahun 2022 terdapat kegiatan belanja modal pembelian 5 unit Laptop kemudian pada tahun 2023 kembali terdapat belanja modal pembelian 3 unit laptop untuk memenuhi keperluan perlengkapan kerja bagi pegawai DPMPTSP.
  - Pada Tahun 2023 terdapat belanja modal untuk mendukung terealisasinya kegiatan pelaksanaan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Lamandau.

5.1.1.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00

Realisasi Belanja Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 & 2022 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Taman	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Penjelasan:  
Pada Tahun 2022 mupun 2023 tidak ada dianggarkan untuk kegiatan belanja modal gedung dan bangunan

5.1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	(5.754.635.972,00)	(5.618.211.812,00)	(4.969.578.527,00)

5.1.3.1 Saldo Anggaran Lebih Tahun 2023

Saldo Anggaran Lebih/Kurang Tahun 2023 sebesar (5.618.211.812,00)

5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi harta atau Aset sebesar Rp 5.017.877.969,00, Kewajiban sebesar Rp 104.866.447,00, dan Ekuitas sebesar Rp 4.913.011.522,00

5.3.1 Aset

Aset	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	5.017.877.969,00	5.282.822.396,00

Total saldo Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 5.017.877.969,00 atau turun sebesar Rp ( 264.944.427,00) dari tahun 2022 dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ ( turun)	
			%	(Rp)
Aset Lancar	18.455.907,00	18.155.615,00	1,65	300.292,00
Aset Tetap	4.999.422.062,00	5.264.666.781,00	(5,04)	(265.244.719,00)
Jumlah	5.017.877.969,00	5.282.822.396,00	(5,03)	(264.944.427,00)

5.3.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	18.455.907,00	18.155.615,00

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 18.455.907,00 atau naik sebesar 300.292,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp. 18.155.615disajikan sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/(turun)	
			%	(Rp.)
Piutang Pendapatan	37.456.640,00	37.456.640,00	0	0,00
Penyisihan Piutang	(21.540.000,00)	(21.540.000,00)	(0,00)	0,00
Beban di bayar di muka	2.539.267,00	2.238.975,00	13,41	300.292,00
Aset Lancar	18.455.907,00	18.155.615,00	1,65	300,292,00

Penjelasan lebih lanjut atas Saldo Piutang adalah sebagai berikut :

5.3.1.1.1 Piutang Pendapatan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Piutang Pendapatan	37.456.640,00	37.456.640,00

Piutang pendapatan merupakan hak pemerintah Kabupaten Lamandau terhadap penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan pajak, pendapatan retribusi dan bagi hasil dari pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, rincian disajikan sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/(turun)	
			%	(Rp.)
Piutang Retribusi	37.456.640,00	37.456.640,00	0,00	0,00
Jumlah	37.456.640,00	37.456.640,00	0,00	0,00

Penjelasan lebih lanjut atas Saldo Piutang adalah sebagai berikut :

5.1.1.1.2 Piutang Retribusi Daerah

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Piutang Retribusi	37.456.640,00	37.456.640,00

Saldo Piutang Retribusi pe 31 Desember 2023 sebesar Rp. 37.456.640,00 dan Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 37.456.640,00 yaitu

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/(turun)	
			%	(Rp.)
Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.979.360,00	2.979.360,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Izin Ganggan	34.477.280,00	34.477.280,00	0,00	0,00
Total	37.456.640,00	37.456.640,00	0,00	0,00

5.3.1.1.4 Penyisihan Piutang

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Penyisihan Piutang	(21.540.000,00)	(21.540.000,00)

Jumlah Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (21.540.000,00) dan (21.540.000,00)  
Penyisihan Piutang terdiri dari :

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/(turun)	
			%	(Rp.)
Penyisihan Piutang Retribusi	(21.540.000,00)	(21.540.000,00)	0,00	0,00
Total	(21.540.000,00)	(21.540.000,00)	0,00	0,00

5.3.1.1.5 Beban Dibayar Dimuka

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Beban Dibayar Dimuka	2.539.267,00	2.238.975,00

Beban Dibayar Dimuka adalah per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.539.267,00 dan saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.238.975,00  
Adapun Rincian Beban Dibayar Dimuka sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2022	Naik/(turun)	
			%	(Rp.)
Beban Pajak Dibayar Di muka	2.539.267,00	2.238.975,00	13,41	300.292,00
Total	2.539.267,00	2.238.975,00	13,41	300.292,00

Adapun rincian Beban Pajak Dibayar Dimuka sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/(turun)	
			%	(Rp.)
Pajak Kendaraan Bermotor	2.539.267,00	2.238.975,00	13,41	300.292,00
Total	2.539.267,00	2.238.975,00	13,41	300,292,00

5.3.1.1.6    **Persediaan**

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Persediaan	0,00	0,00

Saldo Persediaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0,00,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Laporan Persediaan Per 31 Desember 2023			
No	Uraian	Jumlah	
1	Persediaan per 31 Desember 2023	721.704.116,00	0,00
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal		0,00
3	<b>Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)</b>		<b>0,00</b>
4	Ditambah:		
5	Belanja persediaan LRA 2023	721.704,116,00	
6	Belanja persediaan belum dibayar (utang belanja)	0,00	
7	Penerimaan Reklas Barang Ekstrakompentable dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	
8	Penerimaan hibah persediaan	0,00	
9	<b>Jumlah tambahan persediaan (5+6+7+8)</b>	<b>721.704.116,00</b>	
10	<b>Dikurangi :</b>		
11	Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2021	(0,00)	
12	Pengeluaran hibah persediaan	(0,00)	
13	Jumlah tambahan persediaan bersih (11+12)	(0,00)	
14	Jumlah persdiaan yang siap digunakan (3+9+13)		0,00
15	Beban persediaan (lihat laporan Operasional)		<b>(721.704.116,00)</b>
16	<b>Persediaan tahun 2023 (14+15)</b>		<b>0,00</b>



5.3.1.2 Aset Tetap

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Aset Tetap

4.999.422.062,00

5.264.666.781,00

Saldo Aset Tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 4.999.422.062,00, mengalami penurunan sebesar Rp ( 265.244.719,00 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ ( turun)	
			%	(Rp)
Tanah	433.105.000,00	433.105.000,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	4.046.127.885,43	3.754.240.335,43	7,77	291.887.550,00
Gedung dan Bangunan	6.362.876.660,00	6.323.039.660,00	0,63	39.837.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	383.228.800,00	383.228.800,00	0	0,00
Aset Tetap Lainnya	5.943.900,00	5.943.900,00	0	0,00
Akumulasi Penyusutan	(6.231.860.183,43)	(5.634.890.914,43)	(10,59)	(596.969.269,00)
Jumlah	4.999.422.062,00	5.264.666.781,00	(5,04)	(265.544.719,00)

Saldo Awal 1 Januari 2023

5.264.666.781,00

Penambahan :

Belanja Modal (LRA Belanja Modal Tahun 2023)

291.887.550,00

Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

39.837.000,00

Jumlah Penambahan

331.724.550,00

Pengurangan :

Beban Penyusutan 2023

596.969.269,00

Jumlah Pengurangan

(596.969.269,00)

Jumlah ( 1+2-3)

4.999.422.062,00

5.3.1.2.1 Tanah

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Tanah

433.105.000,00

433.105.000,00

Saldo Aset Tetap Tanah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebesar Rp. 433.105.000,00 tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan.

Uraian	Saldo per 31/12/2023	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo per 31/12/2022	Naik/ (Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Tanah	433.105.000,00	0,00	0,00	433.105.000,00	0,00
Jumlah	433.105.000,00	0,00	0,00	433.105.000,00	0,00

Penambahan sebesar Rp. 0,00 dan pengurangan sebesar (Rp. 0,00) dengan rincian sebagai berikut :

Tanah

433.105.000,00

Penambahan

0,00

21

<b>Jumlah Penambahan</b>		<b>0,00</b>
Pengurangan	(0,00)	
<b>Jumlah Pengurangan</b>		<b>(0,00)</b>
<b>Jumlah</b>		<b>433.105.000,00</b>

5.3.1.2.2 Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Peralatan dan Mesin	4.046.127.885,43	3.754.240.335,43

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 4.046.127.885,43 mengalami kenaikan sebesar Rp 291.887.550,00 dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2023	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo per 31/12/2022	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Peralatan dan Mesin	4.046.127.885,43	0,00	291.887550,00	3.754.240.335,43	291.887.550,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.046.127.885,43</b>	<b>0,00</b>	<b>291.887550,00</b>	<b>3.754.240.335,43</b>	<b>291.887.550,00</b>

Peralatan dan mesin **3.754.240.335,,43**

Penambahan :  
- Belanja Modal Tahun 2023 291.887.550,00

Jumlah Penambahan 291.887.550,00

Pengurangan : -  
-  
Jumlah Pengurangan -  
**Jumlah ( 1+2-3) 4.046.127.885,43**

5.3.1.2.3 Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Gedung dan Bangunan	6.362.876.660,00	6.323.039.660,00

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 6.362.876.660,00, tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2023	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2022		Saldo per 31/12/2022	Naik/(Turun)
		Pengura ngan	Penambahan		
Gedung dan Bangunan	6.362.876.660,00	0,00	39.837.000,00	6.323.039.660,00	39.837.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.362.876.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.837.000,00</b>	<b>6.323.039.660,00</b>	<b>39.837.000,00</b>

Penambahan/Penurunan sebesar Rp 39.837.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Gedung dan Bangunan 6.323.039.660,00  
 Penambahan :  
     • Belanja Modal Tahun 2023 (Rincian terdapat pada 0,00  
       penjelasan LRA Belanja Modal Gedung dan Bangunan)  
     • Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan Bangunan dan 39.837.000

Gedung Kantor

Jumlah Penambahan	39.837.000,00
Pengurangan : -	(0,00)
Jumlah Pengurangan	(0,00)
<b>Jumlah ( 1+2-3)</b>	<b>6.362.876.660,00</b>

5.3.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Jalan, Irigasi dan Jaringan	383.228.800,00	383.228.800,00

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 383.228.800,00 tidak mengalami peningkatan ataupun penambahan dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2023	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo per 31/12/2022	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Jalan, Irigasi dan Jaringan	383.228.800,00	0,00	0,00	383.228.800,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>383.228.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.228.800,00</b>	<b>0,00</b>

Penambahan sebesar Rp 0,00 dan pengurangan sebesar (Rp 0,00) dengan rincian sebagai berikut

Jalan, Irigasi dan Jaringan	383.228.800,00
Penambahan :	
• -	0,00
Jumlah Penambahan	0,00
Pengurangan :	
• -	(0,00)
Jumlah Pengurangan	(0,00)
<b>Jumlah (1+2+3)</b>	<b>383.228.800,00</b>

5.3.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Tetap Lainnya	5.943.900,00	5.943.900,00

Saldo Aset Tetap Lainnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0,00, tidak mengalami peningkatan ataupun penambahan dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Aset Tetap Lainnya	5.943.900,00
Penambahan :	
• -	0,00
Jumlah Penambahan	0,00

Pengurangan :		
• -	(0,00)	
Jumlah Pengurangan		(0,00)
<b>Jumlah (1+2+3)</b>		<b>5.943.900.00</b>

5.3.1.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

	31 Desember 2022	31 Desember 2022
Akumulasi Penyusutan	(6.231.860.183,43)	(5.634.890.914,43)

Saldo Aset Akumulasi Penyusutan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2023 adalah sebesar (6.231.860.183,43) mengalami kenaikan sebesar 596.969.269.00, dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/203	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo per 31/12/2022	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Akumulasi Penyusutan	(6.231.860.183,43)	(0,00)	596.969.269,00	(5.634.890.914,43)	596.969.269,00
<b>Jumlah</b>	<b>(6.231.860.183,43))</b>	<b>(0,00)</b>	<b>596.969.269,00</b>	<b>(5.634.890.914,43))</b>	<b>596.969.269,00)</b>

Penambahan sebesar Rp. 596.969.269,00 dan pengurangan sebesar (Rp 0,00) dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan	(5.634.890.914,43)
Penambahan :	
• Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	(292.111.769,00)
• Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	(297.730.368,00)
• Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(7.127.132,00)
Jumlah Penambahan	596.969.269,00
Pengurangan :	
	(0,00)
Jumlah Pengurangan	(0,0)
<b>Jumlah ( 1+2-3)</b>	<b>(6.231.860.183,43)</b>

5.3.1.3 Aset Lainnya

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Lainnya	79.000.000,00	79.000.000,00

Saldo Aset Lainnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebelumnya sebesar Rp 79.000.000,00 tidak mengalami peningkatan ataupun penambahan dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2023	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo per 31/12/2022	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Aset lain-lain	79.000.000,00	0,00	0,00	79.000.000,00	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(79.000.000,00)	0,00	0,00	(79.000.000,00)	
<b>Jumlah</b>	<b>(79.000.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(79.000.000,00)</b>	<b>-</b>

5.3.1.3.1 Aset Lain-lain

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Lain-lain	79.000.000,00	79.000.000,00

Akun ini berisi hasil reklasifikasi barang-barang yang sebelumnya masuk ke dalam kelompok aset tetap berdasarkan hasil inventarisasi seperti kondisi barang rusak berat. Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 79.000.000,00 tidak mengalami peningkatan ataupun penambahan, barang rusak berat yang dimaksud adalah minibus Toyota Avanza dengan nomor plat KH 23 RU.

Uraian	Saldo per 31/12/2023	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo per 31/12/2022	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Aset lain-lain	79.000.000,00	0,00	0,00	79.000.000,00	-
Jumlah	79.000.000,00	0,00	0,00	79.000.000,00	-

Berikut rincian Aset Lain-lain

Uraian	Saldo per 31/12/2023	Saldo per 31/12/2022
Aset Rusak Berat/Usang	79.000.000,00	79.000.000,00
Jumlah	79.000.000,00	79.000.000,00

5.3.1.3.2 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(79.000.000,00)	(79.000.000,00)

Saldo Akmulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp. 79.000.000,00) dan 31 Desember 2023 sebesar (Rp. 79.000.000,00)

Uraian	Saldo per 31/12/2023	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo per 31/12/2022	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(79.000.000,00)	0,00	0,00	(79.000.000,00)	-
Jumlah	(79.000.000,00)	0,00	0,00	(79.000.000,00)	-

5.3.2 Kewajiban

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kewajiban	104.866.447,00	89.984.493,00

Saldo kewajiban yang disajikan per 31 desember 2023 sebesar Rp 104.866.447,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 7.561.121,00 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ ( turun)	
			%	(Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	104.866.447,00	89.984.493,00	16,53	14.881.954,00
Jumlah	104.866.447,00	89.984.493,00	16,53	14.881.954,00

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kewajiban Jangka Pendek	104.866.447,00	89.984.493,00

Saldo kewajiban yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 104.866.447,00 mengalami peningkatan sebesar Rp14.881.954,00 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ ( turun)	
			%	(Rp)
Utang Beban	104.866.447,00	89.984.493,00	16,53	14.881.954,00
Jumlah	104.866.447,00	89.984.493,00	16,53	14.881.954,00

### 5.3.2.1.1 Utang Beban

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Utang beban	104.886.447,00	89.984.493,00

Saldo utang beban yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 104.866.447,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 14.881.954,00dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ ( turun)	
			%	(Rp)
Utang Beban	104.866.447,00	89.984.493,00	16,54	14.881.954,00
Jumlah	104.866.447,00	89.984.493,00	16,54	14.881.954,00

Rincian Utang Beban Pegawai sebagai berikut :

Uraian	Saldo per 31/12/2023	Saldo per 31/12/2022
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Ub. Desember 2023	104.866.447,00	89.984.493,00
Jumlah	104.866.447,00	89.984.493,00

### 5.3.3 Ekuitas

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Ekuitas	4.913.011.522,00	5.192.837.903,00

Saldo ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp 4.913.011.522,00 mengalami penurunan sebesar Rp 279.816.381,00 dibanding dengan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ ( turun)	
			%	(Rp)
Ekuitas	4.913.011.522,00	5.192.837.903,00	(5,39)	(279.826.381,00)
Jumlah	4.913.011.522,00	5.192.837.903,00	(5,39)	(279.826.381,00)

### 5.3.3.1 Kewajiban dan Ekuitas

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kewajiban dan Ekuitas	5.017.877.969,00	5.282.822.396,00

Saldo kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp 5.017.877.969,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 264.944.427,00 dibanding dengan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ ( turun)	
			%	(Rp)
Kewajiban dan Ekuitas	5.017.877.969,00	5.282.822.396,00	(5,01)	(264.944.427,00)
Jumlah	5.017.877.427,00	5.282.822.396,00	(5,01)	(264.944.427,00)

5.4 Kegiatan Operasional

5.4.1 Pendapatan-LO

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban, dan *Surplus/Defisit* operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

LO digunakan dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan Beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

- 1. Berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- 2. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- 3. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektifitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

LO disusun untuk melengkapi laporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Uraian	2023	2022	Kenaikan /(Penurunan)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LO	0,00	16.236.150,00	0,00	(100,00)
Pendapatan Retribusi Daerah	900.000,00	17.136.150,00	0,00	(94,75)

Penjelasan:

- 1. Perubahan nilai Pajak Daerah – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
  - a. Tidak perubahan antara tahun 2022 dan 2023
- 2. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2023 ini sama/lebih besar/lebih kecil\* dari/dengan\* saldo Pendapatan Pajak Daerah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp. 0,- (Rp.900.000 - Rp.900.000) Hal tersebut disebabkan tidak ada perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	0,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ .....dst.....	0,00
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ .....dst.....	0,00
.....dst.....	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih	0,00

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode TA 2023. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 900.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2023 (Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah	900.000,00
Jumlah	900.000,00

Retribusi Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Rumah Dinas yang tarifnya ditetapkan melalui Perda. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Lamandau didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 900.000,00, dan pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 900.000,00.

5.4.2 Beban-LO

Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan realisasi dalam tahun 2022 sebesar Rp 5.580.410.728,00 dan tahun 2023 sebesar Rp 5.898.938.193,00 dan dapat diuraikan sebagai berikut.

Realisasi masing-masing jenis Beban tahun 2023 dan tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	2023	2022
Beban Pegawai	3.175.279.521,00	3.111.860.079,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	292.111.769,00	367.331.582,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	297.730.368,00	301.342.927,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	7.127.132,00	9.567.129,00
Jumlah	3.772.248.790,00	3.790.101.717,00

5.3.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan Beban Pegawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp 3.175.279.521,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp 63.419.442,00, atau (2,04%) bila dibandingkan dengan beban pegawai tahun 2022 sebesar Rp 3.111.860.079,00 Beban pegawai disajikan dengan basis akrual, pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2023 dan termasuk belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2022 (Tunjangan Tambahan Penghasilan Ub. Desember 2022).

Rincian Beban Pegawai tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Uraian	saldo 31 Des 2023	saldo 31 Des 2022	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.229.439.700,00	1.212.900,00	17.151.800,00	1,41
Beban Tunjangan Keluarga PNS	111.575.236,00	110.284.202,00	1.291.034,00	1,18
Beban Tunjangan Jabatan PNS	162.530.000,00	157.960.000,00	4.570.000,00	2,89
Beban Tunjangan Fungsional PNS	25.640.000,00	26.240.000,00	(600.000,00)	(2,29)
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	0,00	0,00	0,00	0
Beban Tunjangan beras PNS	76.692.780,00	77.272.140,00	(579.360,00)	0,75
Beban Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus PNS	43.007.222,00	53.274.013,00	(10.266.791,00)	19,27
Beban pembulatan Gaji PNS	14.351,00	13.888,00	463,00	3,33
Beban Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS	1.117.193.785,00	1.166.257.936,00	(49.064.151,00)	4,21
Beban Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN	296.160.000,00	302.150.000,00	(5.990.000,00)	(1,98)



Beban Honorarium Pejabat Pengadaan	8.160.000,00	6.120.000,00	2.040.000,00	33,33
<b>Jumlah</b>	<b>3.175.279.521,00</b>	<b>3.111.860.079,00</b>	<b>(63.419.442,00)</b>	<b>(20,33)</b>

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
  - Belanja Pegawai Mengalami kenaikan dikarenakan adanya Pegawai Pejabat Kepala Dinas Depenitif ,kenaikan pangkat dan kenaikan Gaji berkala ditahun 2023.
  - Karena adanya kenaikan Golongan/pangkat dan kenaikan Gaji Berkala Pegawai
- Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2023 ini ~~sama~~lebih besar/~~lebih kecil~~\* dari/~~dengan~~\* saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2023 sebesar Rp. 14.881.954,00 (Rp. 3.175.279.521,00 - Rp. 3.160.397.567,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>14.881.954,00</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
➤ Penambahan beban LO :	
✓ Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS	104.866.447,00
✓	0,00
✓	0,00
➤ Pengurangan beban LO :	
✓ Beban Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS	89.984.493,00
✓	0,00
✓	0,00
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>14.881.954,00</b>

5.3.2.2 Beban Barang dan Jasa

Uraian	2023	2022
Beban Barang Pakai Habis	721.704.116,00	523.101.827,00
Beban Jasa Kantor	641.345.678,00	645.765.719,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	19.551.604,00	16.951.491,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	9.740.000,00	9.110.000,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	23.000.000,00
Beban Kursus/Pelatihan,Sosialisasi,Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.	6.000.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.690.000,00	14.120.000,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	19.795.900,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	710.658.005,00	538.464.074,00
	<b>2.126.689.403,00</b>	<b>1.790.309.011,00</b>

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
  - Hal ini disebabkan karena adanya tambahan pagu anggaran kegiatan tahun 2023, yaitu kegiatan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga ,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata dan tambahan anggaran untuk Perjalanan dinas, kegiatan makan/minum bimbingan teknis bagi pelaku usaha di program kegiatan Pngendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, serta terdapat penambahan belanja rehab/pemeliharaan gedung kantor.
- Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2023 ini ~~sama~~lebih besar/~~lebih kecil~~\* dari/~~dengan~~\* saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2023 sebesar Rp. - 40.137.265,00 (Rp. 2.126.689.403,00 - Rp. 2.166.826.695,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	- 40.137.265,00
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
➤ Penambahan Beban LO :	2.238.975,00
✓ Beban Pajak dibayar dimuka Kendaraan Bermotor Tahun 2022	2.238.975,00
✓	0,00
✓	0,00
➤ Pengurangan Beban LO	42.376.267,00
✓ Beban Pajak dibayar dimuka Kendaraan Bermotor Tahun 2023	2.539.267,00
✓ Reklas dari barang dan jasa (beban pemeliharaan) ke gedung dan Bangunan (KIB C)	39.837.000,00
	0,00
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>- 40.137.265,00</b>

### 5.3.2.3      Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan Beban Persediaan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 721.704.116,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp 198.602.289,00 atau 37,96% bila dibandingkan dengan beban persediaan tahun 2022 sebesar Rp 523.101.827,00, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi	15.275.000,00	9.460.000,00	5.815.000,00	61,47
Beban Bahan-bahan Kimia	3.140.000,00	1.240.000,00	1.900.000,00	153,23
Beban Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	32.379.926,00	39.905.000,00	(7.525.074,0)0	(18,86)
Beban Bahan-Bahan Lainnya	8.528.000,00	6.685.000,00	1.843.000,00	27,57
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	36.500.000,00	16.374.000,00	20.126.000,00	122,91
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	88.281.945,00	99.774.427,00	(11.492.482,00)	(11,52)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	142.929.450,00	137.241.900,00	5.687.550,00	4,14
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	5.200.000,00	4.995.000,00	205.000,00	4,10
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.765.000,00	4.649.000,00	2.116.000,0	45,52
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	29.500.000,00	0,00	29.500.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	40.584.695,00	0,00	40.584.695,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20.145.000,00	29.347.150,00	(9.202.150,00)	(31,36)
Beban Makanan dan Minuman Rapat	234.090.100,00	107.486.350,00	126.603.750,00	117,79
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	4.380.000,00	(4.380.000,00)	(100,00)
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.010.000,00	18.214.000,00	(15.204.000,00)	(83,47)
Beban Pakaian Olahraga	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00
Beban Pakaian KORPRI	19.375.000,00	0,00	19.375.000,00	0,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	24.050.000,00	(24.050.000,00)	(100,00)

Beban Pakaian Batik Tradisional	0,00	19.300.000,00	(19.300.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>721.704.116,00</b>	<b>523.101.827,00</b>	<b>198.602.289,00</b>	<b>37,96</b>

### 5.3.2.2      **Beban Jasa**

Beban Jasa merupakan Beban Jasa yang meliputi antara lain jasa konsultan, listrik, air, telepon, internet dan lainnya, periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp 676.637.282,00 mengalami penurunan sebesar Rp (18.189.928,00) atau 2,62% bila dibandingkan dengan beban jasa tahun 2022 sebesar Rp 694.827.210,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	24.500.000,00	22.900.000,00	1.600.000,00	6,99
Beban Jasa Tenaga Administrasi	169.591.875,00	138.083.376,00	31.508.499,00	22,82
Beban Jasa Tenaga Ahli	181.000.000,00	207.000.0000,00	(26.000.000,00)	(12,56)
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	62.930.773,00	48.112.753,00	14.818.020,00	30,80
Beban Jasa Tenaga Keamanan	22.956.000,00	22.920.000,00	36.000,00	0,16
Beban Jasa Tenaga Sopir	20.724.000,00	20.688.000,00	36.000,00	0,17
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	32.688.000,00	(32.688.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tagihan Air	7.048.900,00	7.774.600,00	(725.700,00)	(9,33)
Beban Tagihan Listrik	91.757.322,00	87.083.248,00	4.674.074,00	5,37
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	11.184.000,00	10.734.000,00	450.000,00	4,19
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	43.246.800,00	41.739.600,00	1.507.200,00	3,61
Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	6.406.008,00	6.042.142,00	363.866,00	6,02
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	18.061.424,00	15.638.428,00	2.422.996,00	15,49
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.490.180,00	176.520,00	1.313.660,00	744,20
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0,00	1.136.543,00	(1.136.543,00)	(100,00)
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	23.000.000,00	(23.000.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	5.200.000,00	(5.200.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	9.740.000,00	3.910.000,00	5.830.000,00	149,10
Beban Sosialisasi		0,00	0,00	0,00
eban Bimbingan Teknis	6.000.000		6.000.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>676.637.282,00</b>	<b>694.827.210,00</b>	<b>(18.189.928,00)</b>	<b>2,62</b>

5.3.2.3      **Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan merupakan Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp 17.690.000, dan penurunan sebesar Rp (16.225.900,00) atau 47,84% bila dibandingkan dengan beban pemeliharaan tahun 2022 sebesar Rp 33.915.900,00.

OPD	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	4.890.000,00	0,00	4.890.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00	1.300.000,00	(1.300.000,0)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	620.000,00	(620.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.800.000,00	12.200.000,00	600.000,00	4,92
Beban Pemeliharaan Bangunan Geung-Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	19.795.900,00	(19.795.900,00)	(100,00)
Jumlah	17.690.000,00	33.915.900,00	(16.225.900,00)	(47,84)

**Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan realisasi sebesar Rp 710.658.005,00 dan mengalami kenaikan sebesarRp 172.193.931,00 atau 31,98% bila dibandingkan dengan beban perjalanan dinas tahun 2022 sebesar Rp 538.464.074,00 Beban Perjalanan meliputi Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	464.327.055,00	311.969.074,00	152.357.981,00	48,84
Beban Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	246.330.950,00	226.495.000,00	19.835.950,00	8,78
Jumlah	710.658.005,00	538.464.074,00	172.193.931,00	31,98

5.3.2.4      **Beban Penyusutan**

Beban Penyusutan adalah beban yang berasal dari aset tetap berdasarkan masa manfaat, asset tetap tahun 2023 sudah dilakukan penyusutan sampai dengan posisi per 31 Desember 2023 sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamandau. Total Beban Penyusutan Tahun 2023 sebesar Rp 596.969.269,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp (81.272.369) atau (11,98%) bila dibandingkan dengan Beban Penyusutan tahun 2022 sebesar Rp 678.241.512,00. Beban Penyusutan sebagai berikut:

Uraian	saldo 31 Des 2023	saldo 31 Des 2022	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	292.111.769,00	367.331.582,00	(75.219.813,00)	(20,48)
Beban Penyusutan Gedung & Bangunan	297.730.368,00	301.342.927,00	(3.612.559,0)0	(1,20)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	7.127.132,00	9.567.129,00	(2.439.997,00)	(25,50))
Jumlah	596.969.269,0	678.241.638,00	(81.272.369,00)	(11,98)

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
  - a. Perubahan Beban Penyusutan dan Amortisasi disebabkan oleh penurunan nilai manfaat peralatan dan mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Jaringan dan Irigasi.

5.3.2.6 Surplus/Defisit LO

Surplus / Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Surplus/Defisit LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan	900.000,00	17.136.150,00	(16.236.150,00)	94,75
Beban	5.898.938.193,00	5.580.410.728,00	(318.527.465,00)	5,71
Surplus/Defisit LO	(5.898.038.193,00)	(5.563.274.578,00)	(334.763.615,00)	6,02

5.5 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
EKUITAS AWAL	5.192.837.903,00	5.908.639.814,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.898.038.193,00)	(5.563.274.578,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
Barang Ekstrakompatabel Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Koreksi Nilai Piutang	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Utang Beban	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Hutang Beban Barang dan Jasa	0,00	0,00
Koreksi Utang PFK	0,00	0,00
Koreksi Beban Pajak Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Hutang Beban Pegawai	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	0,00	0,00
Koreksi Investasi Permanen Kerugian Bajurung Raya	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara Dana BOS	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Peratalatan dan mesin	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00

Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyisihan Piutang	0,,00	37.456.640,00
<b>JUMLAH DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.456.640,00</b>
<b>KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN</b>	<b>5.618.211.812,00</b>	<b>4.810.016.027,00</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>4.913.011.522,00</b>	<b>5.192.837.903,00</b>

Penjelasan :

1. Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2023 merupakan Ekuitas Akhir tahun 2022 senilai Rp 5.192.837.903,00 ;
2. Surplus/Defisit – LO senilai Rp. 5.898.038.183,00 merupakan kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lamandau tahun 2023;
3. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan sebesar Rp 5.618.211.812,00;
4. Saldo Ekuitas Akhir sebesar Rp 4.193.011.522,00 sama dengan ekuitas di Neraca per 31 Desember 2023.

**BAB VI**  
**PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI**  
**NON KEUANGAN SKPD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lamandau mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, DPMPTSP Kabupaten Lamandau mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Penyelenggaraan administrasi dan teknis kegiatan promosi daerah;
3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
4. Pelaksanaan pengendalian kegiatan promosi daerah, pelayanan perizinan dan nonperizinan;
5. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pembinaan, pelayanan dan pelaporan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

Untuk melaksanakan amanat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lamandau, susunan organisasi DPMPTSP Kabupaten Lamandau meliputi :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Program Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
4. Bidang Promosi Penanaman Modal;
5. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;
6. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan A;
7. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan B;
8. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
10. Unit Pelaksana Teknis

Adapun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan komposisi per Desember 2023 terdiri atas 25 (dua puluh lima) ASN dan 10 (sepuluh) Staf non ASN / THL, total keseluruhan sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, Adapun ASN terdiri dari:

- 1. Eselon II : 1 Orang
- 2. Eselon III : 6 Orang
- 3. Eselon IV : 2 Orang
- 4. Pejabat fungsional : 6 Orang
- 5. Staf/Non Eselon : 10 Orang

Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian tabel dibawah ini:

No	Gol/Ruang	Tk. Pendidikan				Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	
1	IV/b	I				1
2	IV/a	2	3			5
3	III/d		7			6
4	III/c		1	1		3
5	III/b					
6	III/a			1	7	8
7	II/d				2	2
8	II/c					
9	II/b					
10	II/a					
Jumlah ASN		3	11	2	9	25
Jumlah THL			4		6	10
Jumlah ASN + THL		3	15	2	15	35



**BAB VII**  
**PENUTUP**

Demikian uraian Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lamandau selama Tahun 2023 disajikan dengan harapan dapat memberikan gambaran lebih rinci pencapaian target pendapatan, realisasi belanja pada kurun waktu satu tahun anggaran. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan salah satu media informasi untuk mengukur kinerja SKPD pada tahun anggaran berjalan serta sebagai alat kontrol, kendali dan pengawasan serta pertanggungjawaban.

Nanga Bulik,      Juni 2024  
Kepala Dinas,  
  
**MUL'ATMIDY, S.Sos, M.A.P**  
Pembina Tingkat I (IV.b)  
NIP. 19790402 200502 1 004